

Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Adi Siswanto¹, Fitriah Ningsih²

^{1,2}Politeknik Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Profesi Indonesia

E-mail: adisiswanto89@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.2890>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 19 Juny 2025

Revised: 22 Juny 2025

Accepted: 30 Juny 2025

Kata Kunci:

PSAK 72, Nilai Perusahaan, Tobin's Q, IFRS 15, Sektor Properti dan Real Estat

Keyword:

PSAK 72, Company Value, Property Industry Sector Companies



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara melalui empat indikator implementasi yang digunakan sebagai fokus penelitian. Metode penelitian yakni Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga dapat memudahkan penulis untuk bisa mendapatkan data yang objektif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara ditinjau dari aspek komunikasi telah disosialisasikan ke seuruh pegawai dan stake holder terkait namun masih belum terlaksana secara maksimal. Pendayagunaan sumber daya kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara sudah cukup tersedianya sumber daya manusia yang menunjang pada pelaksanaan Implementasi PERDA Nomor 1 Tahun 2016. Namun pada aspek ketersediaannya fasilitas kawasan khusus bagi orang merokok belum tersedia sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan masih kurang maksimal. Sikap atau disposisi implementor dalam mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara, belum berjalan dengan maksimal, tidak konsistennya penegakan aturan larangan merokok di Kawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara baik bagi seluruh pegawai maupun tamu yang datang.

This study aims to determine and analyze the Implementation of the Smoke-Free Area Policy in the Education and Culture Office of North Morowali Regency through four implementation indicators used as the focus of the study. The research method, namely Peineiliitiian, is descriptive in nature, namely to know or describe the reality of the events being studied so that it can facilitate the writer to be able to obtain objective data. The results of this study indicate that the Implementation of the Smoke-Free Area Policy in the Education and Culture Office of North Morowali Regency, reviewed from the communication aspect, has been socialized to all employees and related stakeholders but has not been implemented optimally. The utilization of policy resources in the implementation of the Smoke-Free Area Policy at the North Morowali Regency Education and Culture Office is sufficient, with human resources available to support the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2016. However, the availability of designated smoking areas is still lacking, resulting in less than optimal implementation of the policy. Implementers' attitudes and dispositions in socializing and implementing the Smoke-Free Area Policy at the North Morowali Regency Education and Culture Office have not been optimal,

and enforcement of the smoking ban within the North Morowali Regency Education and Culture Office area is inconsistent for both employees and guests.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Adi Siswanto

, et al (2025) Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara , 3(4). 6041-6045 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.2890>

PENDAHULUAN

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya menekan prevalensi perokok aktif maupun pasif di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan kebijakan KTR melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap institusi, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, sarana olahraga, angkutan umum, serta tempat kerja wajib menerapkan kawasan tanpa rokok.

Penerapan kebijakan KTR memiliki tujuan strategis, yakni melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, menurunkan angka perokok, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan bebas dari zat adiktif (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebagai institusi pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut, terutama karena lembaga ini erat kaitannya dengan dunia pendidikan yang seharusnya menjadi teladan dalam perilaku hidup sehat.

Kabupaten Morowali Utara, sebagai salah satu daerah di Sulawesi Tengah, memiliki komitmen dalam mendukung kebijakan nasional terkait pengendalian konsumsi rokok. Namun, implementasi kebijakan KTR di tingkat daerah, khususnya pada instansi pemerintah, seringkali menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tantangan dalam penerapan KTR di lingkungan kerja meliputi kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran pegawai dan masyarakat terhadap bahaya merokok (Rosida & Adisasmito, 2018; Suryani, 2020).

Kondisi ini juga relevan dengan realitas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Meskipun secara formal kebijakan KTR telah ditetapkan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat pelanggaran terhadap aturan tersebut, baik oleh pegawai maupun pengunjung. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap citra institusi pendidikan sebagai pelopor perilaku hidup sehat, serta mengurangi efektivitas kebijakan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas asap rokok.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting dilakukan kajian mengenai implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan KTR diimplementasikan, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar kebijakan tersebut dapat berjalan lebih optimal. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kebijakan pengendalian rokok di lingkungan instansi pemerintah, khususnya sektor pendidikan, serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga dapat memudahkan penulis untuk bisa mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami “Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara”.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih dari 2 (dua) bulan pada tanggal yang belun ditentukan. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali

Utara dengan pertimbangan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis sumber data, yaitu:

Data Primer, yaitu: data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dilapangan dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan dan dinas-dinas lainnya sebagai penanggung jawab sedangkan Data Sekunder data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah peneliti. Data mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang dapat berwujud laporan dan lain- lainnya. Jenis studi penelitian studi pustaka

Teknik Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk dapat memperoleh data yang valid.

Wawancara

Pelaksanaan wawancara mendalam dilakukan dengan melaksanakan percakapan dengan responden tetapi dalam percakapan tersebut tidak sekedar tanya jawab biasa, akan tetapi merupakan percakapan untuk mendalami pengalaman dan makna dari pengalaman responden terkait dengan fokus penelitian.

Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan dari dekat, tentang obyek yang sementara diteliti. Dalam hal ini penulis akan mengamati langsung proses yang terjadi di lapangan. Pada tahapan observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung atas implementasi kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dilapangan dengan jumlah yang cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti dilapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing/verifikation* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi) Langkah ketiga dalam penulisan kualitatif adalah Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal didukung kembali oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Komunikasi

Berikut dibawah ini tentang informasi telah mendapatkan Sosialisasi dari pemerintah daerah tentang Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Bebas Merokok (KTR) Kabupaten Morowali Utara.

“terkait dengan sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok setelah kami mendapatkan sosialisasi dari opd terkait yaitu dinas kesehatan dan dinas terkait lainnya maka dinas pendidikan Menindaklanjuti dengan beberapa program-program tertentu misalnya mensosialisasikan di tingkat internal secara masif dan juga eksternal itu adalah termasuk lembaga-lembaga Yang Terus Yang

Terus lakukan pelayanan misalnya sekolah-sekolah, Kepala Sekolah yang akan datang berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan kami terus melakukan sosialisasi Secara masif yang selanjutnya terkait dengan sosialisasi kami tidak lanjut dengan beberapa kesepakatan-kesempatan misalnya kami meminta lanjuti dengan berusaha untuk menyiapkan infrastruktur dan lain sebagainya menyiapkan waktu-waktu tertentu untuk membicarakan tentang pentingnya kawasan tanpa rokok”

Melalui wawancara ini, tergambar bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara telah aktif dalam mengambil langkah-langkah konkret untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan pendidikan dan budaya. Upaya ini mencerminkan komitmen mereka dalam mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat

Dalam wawancara tersebut, Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa setelah menerima sosialisasi dari berbagai OPD terkait, terutama Dinas Kesehatan dan OPD lainnya, mereka mengambil beberapa langkah tindak lanjut. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi secara internal dan eksternal. Secara internal, mereka menyampaikan informasi kepada seluruh pegawai secara masif untuk memastikan pemahaman yang baik tentang kebijakan kawasan tanpa rokok. Sementara secara eksternal, mereka berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti sekolah-sekolah, dan berkomunikasi dengan kepala sekolah secara langsung untuk meningkatkan kesadaran akan kebijakan tersebut di tingkat lokal.

Selanjutnya, Dinas Pendidikan juga mengambil langkah dalam persiapan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan. Mereka berusaha menyiapkan waktu-waktu khusus untuk membicarakan tentang pentingnya kawasan tanpa rokok dan juga berupaya mempersiapkan ruang kerja yang bebas rokok sebagai salah satu langkah konkret dalam mendukung kebijakan tersebut.

Tidak hanya itu, Dinas Pendidikan juga menekankan perlunya pembicaraan yang berkelanjutan tentang pentingnya kebijakan kawasan tanpa rokok. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memandang sosialisasi sebagai langkah sekali jalan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya yang berkesinambungan untuk menjaga kesadaran dan dukungan terhadap kebijakan tersebut di lingkungan pendidikan.

Dengan demikian, langkah-langkah tindak lanjut dari Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali Utara, seperti sosialisasi intensif, persiapan infrastruktur, dan pembicaraan yang berkelanjutan, mencerminkan komitmen mereka dalam mendukung implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih.

Sumber Daya

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh informan yang menyatakan bahwa :

“ketersediaan sumber daya dalam mensosialisasikan itu sebenarnya tersedia hanya pelaksanaannya saja karena cara-cara penanganannya itu kan harusnya ada semacam tulisan-tulisan literasi yang bisa dibaca setiap tamu yang datang bahwa Kawasan ini bebas asap rokok jadi kalo sumber day aitu tersedia cuma dalam pelaksanaannya itu yang belum belum apa namanya dapat strategi yang ideal, setiap pegawai semua bisa disiplin dalam menjaga kawasan ini tampak rokok”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai ketersediaan sumber daya dalam mensosialisasikan kawasan tanpa rokok di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara, terlihat bahwa sumber daya memang tersedia namun pelaksanaannya masih menjadi tantangan. Strategi yang ideal perlu dikembangkan untuk memastikan setiap pegawai disiplin dalam menjaga kawasan tersebut bebas dari asap rokok.

Dalam hal ini, salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menyediakan materi literasi yang jelas dan mudah diakses untuk setiap tamu yang datang ke kawasan tersebut. Materi literasi ini dapat berisi informasi mengenai kebijakan kawasan bebas asap rokok, dampak negatif dari merokok, serta pentingnya menjaga lingkungan bebas asap rokok untuk kesehatan bersama.

Selain itu, perlu juga pengembangan strategi internal yang kuat di antara para pegawai untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok. Hal ini bisa mencakup pembentukan komite atau tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan kebijakan tersebut, serta pelatihan dan sosialisasi yang berkala untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan pegawai.

Dengan demikian, kombinasi antara penyediaan sumber daya informasi yang memadai dan implementasi strategi internal yang efektif dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran dan

kepatuhan terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Selain sumber daya manusia penyediaan infrastruktur pendukung dalam implementasi kebijakan Kawasan tanpa rokok pada dinas Pendidikan dan kebudayaan daerah kabupaten morowali perlu menjadi perhatian oleh karena ini berdasarkan hasil wawancara terhadap informan di temukan informasi sebagai berikut :

“terkait dengan infrastruktur yang kami siapkan sebagaimana di ruang pelayanan publik mulai dari ruang pelayanan publik sampai ruang pertemuan dan misalnya ruang kerja para pejabat itu kita berikan fasilitas pendukung untuk menjadi kawasan tanpa rokok misalnya kita siapkan pendingin AC dan lain sebagainya kemudian kita buat pintu dan jendela tertutup sehingga kerja-kerja mereka itu termasuk kerja-kerja yang terukur untuk terjadinya ruangan sebagai kawasan tanpa rokok.”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai infrastruktur dalam mendukung kawasan tanpa rokok di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara, terlihat bahwa langkah-langkah telah diambil untuk mempersiapkan infrastruktur yang mendukung keberhasilan kawasan tanpa rokok, terutama di ruang pelayanan publik dan ruang kerja para pejabat.

Disposisi

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara, disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi. Para pelaksana kebijakan tidak hanya perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis untuk melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi juga harus memiliki kemauan atau komitmen yang kuat untuk melaksanakannya dengan baik.

Disposisi yang positif, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, kecerdasan, dan sikap demokratis, akan membantu para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas mereka secara efektif. Jika terdapat kesenjangan antara disposisi para pelaksana kebijakan dengan tujuan atau perspektif pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan dapat menjadi tidak efektif dan efisien.

Dengan demikian, penting bagi para pelaksana kebijakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk memiliki disposisi yang sesuai dengan tujuan kebijakan kawasan tanpa rokok. Hal ini akan memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan bebas dari asap rokok.

Sehubungan dengan uraian diatas, Informan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara menyatakan bahwa:

Top of Form

“Terima kasih, sampai saat ini kami belum memberikan sanksi secara administratif kepada pelanggar aturan tersebut kami pada sampai pada himbauan himbauan tentang pentingnya kawasan tanpa rokok dan paling tidak kami terus mensosialisasikan bahwa kawasan tanpa rokok itu untuk kepentingan kita semua termasuk Kepulauan terhadap masyarakat Oke kedepan kami berusaha untuk menyiapkan regulasi regulasi internal terkait dengan pejabat atau Tidak kami terus mensosialisasikan bahwa kawasan tanpa rokok itu untuk kepentingan kita semua termasuk untuk pelayanan terhadap masyarakat ke depan kami berusaha untuk menyiapkan regulasi regulasi internal terkait dengan pejabat ataupun staf kami ataupun masyarakat yang melakukan kegiatan dinas pendidikan yang melanggar terhadap ketentuan tentang kawasan tanpa perokok”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara belum memberlakukan sanksi administratif terhadap pelanggar aturan kawasan tanpa asap rokok. Meskipun demikian, pihak terkait telah intensif dalam melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya kawasan tanpa asap rokok, sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan bahaya merokok dan manfaat kawasan tanpa asap rokok bagi kepentingan bersama. Selain itu, dinas tersebut tengah mempersiapkan regulasi internal yang akan mengatur pelanggaran aturan tersebut, termasuk tindakan yang akan diambil terhadap pejabat, staf, maupun masyarakat yang melanggar ketentuan kawasan tanpa asap rokok. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menyediakan landasan hukum yang jelas dan tegas dalam penegakan aturan tersebut di lingkungan dinas tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dari informan lainnya di dinas Pendidikan dan kebudayaan daerah kabupaten morowali utara yang menyatakan bahwa :

“memang ada disposisi dari pejabat langsung atasan langsung tapi itu dalam lisan tapi dalam bentuk Aturan itu dalam bentuk tertulis belum ada”

Berdasarkan wawancara tersebut di atas terlihat bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara telah berupaya untuk memberi arahan kepada para pegawai untuk mematuhi peraturan tentang Kawasan bebas rokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara namun tidak berjalan dengan maksimal karena belum dibuat aturan secara tertulis tentang tata cara pelaksanaannya sebagai acuan untuk menegakkan peraturan tersebut.

Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan tanpa rokok di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara, struktur organisasi memainkan peran yang sangat penting. Salah satu aspek penting dari struktur organisasi adalah keberadaan Standar Prosedur Operasional (SOP). Aspek ini meliputi dua hal utama: mekanisme dan struktur birokrasi. Mekanisme, dalam konteks implementasi kebijakan tanpa rokok, sering kali telah ditetapkan melalui SOP. SOP berfungsi sebagai panduan bagi setiap pelaksana kebijakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tanpa rokok sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, struktur birokrasi yang terlalu kompleks dan panjang dapat menyebabkan masalah, seperti melemahkan pengawasan dan memperkenalkan prosedur birokrasi yang rumit. Hal ini pada akhirnya dapat menghambat fleksibilitas dalam aktivitas organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, dengan adanya SOP, para pelaksana kebijakan dapat mengoptimalkan waktu mereka dan memastikan keseragaman tindakan di tengah struktur organisasi yang kompleks. Ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dan konsistensi yang lebih tinggi dalam penerapan kebijakan tanpa rokok.

Selain SOP, struktur birokrasi juga memiliki peran yang signifikan dalam implementasi kebijakan tanpa rokok di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Struktur birokrasi mencakup karakteristik, norma, dan pola hubungan dalam organisasi. Hal ini mencakup kemampuan dan kriteria staf, hierarki pengawasan, sumber daya pelaksana, validitas organisasi, dan tingkat komunikasi. Komunikasi yang efektif, baik secara vertikal maupun horizontal, antara pelaksana dan pembuat kebijakan tanpa rokok juga merupakan elemen penting dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

Sehubungan dengan uraian di atas, peneliti akan mengurai secara rinci tahapan dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara dari Segi Struktur Birokrasi Sebagaimana yang di ungkapkan oleh informan dengan pertanyaan apakah dilakukan pembentukan Komite atau kelompok kerja penyusun Juklat dan juklis pelaksanaan kawasan tanpa rokok :

“Secara Institusi di kantor kami belum ada tim yang dibentuk untuk Penyusunan juknis dan juklat karena sebenarnya sudah disusun oleh esekutif yaitu pemerintah daerah terbuat didalam PERDA No.1 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok dimana masing-masing Pimpinan menjadi Penanggungjawab KTR wajib melakukan serta mengimplemntasikan kebijakan tersebut sesuai dengan uraian yang ada sehingga kepala SKPD atau pimpinan institusi sekaligus menjadi pengawasan terhadap setiap orang yang merokok di Kawasan tanpa rokok (KTR) yang menjadi wilayah kerjanya sehingga kami disini hanya menjalankan dan mengimplementasikan sekaligus mengawasi kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang ada.

KESIMPULAN

Dari uraian yang di jelaskan dalam bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara ditinjau dari aspek komunikasi telah disosialisasikan ke seuruh pegawai dan stake holder terkait namun masih belum terlaksana secara maksimal.
2. Pendayagunaan sumber daya kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara sudah cukup tersedianya sumber daya manusia yang menunjang pada pelaksanaan Implementasi PERDA Nomor 1 Tahun 2016. Namun pada aspek ketersediaannya fasilitas kawasan khusus bagi orang merokok belum tersedia sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan masih kurang maksimal.

3. Sikap atau disposisi implementor dalam mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara, belum berjalan dengan maksimal, tidak konsistennya penegakan aturan larangan merokok di Kawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara baik bagi seluruh pegawai maupun tamu yang datang.
4. Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara dari aspek Struktur birokrasi belum terlaksana secara efektif yang ditandai belum adanya Standard Operating procedure (SOP) dan Fragmentation (penyebaran tanggung jawab) belum berjalanya mekanisme yang baku, sehingga sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan belum terlaksana secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solihin (2008). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Agustino Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ahmadi, Nugroho .(2012). “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intellectual capital Disclosure*”. *Accounting Analysis journal* . 1 (2)
- AR. Mustopadidjaya (2002), *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta:LAN
- Abdullah, Syukur, 1987. Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang
- Badjuri H. Abubakar, Yuwono Teguh, 2002, *Kebijakan Publik, Konsep dan Stratcgi*, Semarang : JIP FISIP Universitas Diponegoro.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princenton University Press, New Jersey.
- Jones, O. Charles. 1984, *An Introduction to the Study of Public Policy Third Edition*, California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Kaplan, Abraham, 1964. *The Conduct of Inquiry: Methodology for Behavioral Science*. Chandler Publishing. San Fransisco.
- Lester, James, P., dan Stewart, Joseph, Jr., 2000, *Public Policy: An Evolutionary Approach*, Belmont: Wadsworth
- Lubis, M. Solly, 2007. *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung.
- Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama
- Maleong, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Rineka Cita. Jakarta
- Mazmanian, Daniel A., dan Sabatier, Paul A., 1989. *Implementation and Public Policy*. University Press of America. Lanham MD.
- Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Nasution, Arman Hakim. (2003), *Perencanaan dan Pengendalian Produksi*, Edisi 1, Guna Widya Surabaya.
- Rittel, Horst WJ. And Webber, Melvin, 1973. *Dilemmas In A General Theory ofplanning, Policy Sciences*
- Sabatier, Paul. 2005, ‘*From policy implementation to policy change: a personal odyssey*’, in A. Gornitzka, M. Kogan and A. Amaral (eds), *Reform and change in higher education: analyzing policy implementation*, Dordrecht: Springer, pp. 17-34
- Sabatier, Paul and Mazmanian, Daniel, 1980. *The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis*, *Policy Stuides Journal: Volume 8, Issue 4, January 1980, Pages 538–560*
- Santoso, Amir. 1993. *Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta:Gramedia.
- Suwandi, Made. 2010. “Menimbang 10 Tahun Pelayanan Publik EraOtonomi Daerah”. *Jurnal Ilmu Politik*. No.21. Jakarta: AIPI.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*.Alfabeta:Bandung
- Widodo, Joko, 2007. *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia Publishing Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Jakarta: PT Buku Kita.

Analisis Nilai Perusahaan Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 72 di Indonesia: Pendapat dari Kontrak Dengan Pelanggan (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estat), Mimin Widaningsih, Elis Mediawati, Raihan Hazim, Ira Revita, S. Rizka Nuriyah 6117

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Morowali Utara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan